

BAB V

KESIMPULAN REKOMENDASI DAN IMPLEMENTASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan melalui temuan, analisis, pembahasan, serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi digitalisasi administrasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.

5. Kondisi administrasi manual terbukti menjadi hambatan signifikan dalam efektivitas kinerja organisasi. Kendala utama yang ditemukan meliputi distribusi dokumen yang lambat, pencarian arsip yang sulit, koordinasi antarbagian yang terhambat, tingginya biaya operasional, rendahnya transparansi, serta lemahnya keamanan data. Hal ini sejalan dengan teori administrasi modern yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya organisasi.
6. Digitalisasi administrasi dengan penerapan berbagai fitur seperti pencatatan surat digital, pencarian arsip terintegrasi, notifikasi otomatis, backup data, dan audit trail terbukti mampu menjawab permasalahan sistem manual. Temuan lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempercepat distribusi dokumen dan memudahkan pencarian arsip, tetapi juga meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan menghemat biaya operasional.
7. Dari perspektif koordinasi, digitalisasi memperlihatkan peran pentingnya dalam memperlancar komunikasi antarbagian. Fitur notifikasi otomatis, dashboard progres, dan forum komunikasi daring dipandang mampu mengurangi hambatan birokrasi manual, sesuai dengan teori koordinasi digital yang menekankan efektivitas teknologi dan kesiapan organisasi.
8. Aspek regulasi menjadi perhatian penting dalam implementasi digitalisasi. Semua informan menekankan bahwa aplikasi yang dikembangkan harus selaras dengan kebijakan nasional, khususnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi tidak hanya

ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kesesuaian dengan kerangka regulasi.

9. Perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah implementasi memperlihatkan transformasi nyata: dari sistem yang lambat, boros, dan kurang akuntabel menuju sistem yang lebih cepat, efisien, transparan, aman, hemat biaya, dan sesuai regulasi. Perubahan ini tidak hanya dirasakan dalam aspek internal organisasi, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan, analisis, pembahasan, serta kesimpulan pada Bab IV, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan baik untuk pihak praktisi (organisasi/pemerintah daerah) maupun akademisi (peneliti selanjutnya).

A. Rekomendasi Praktis

1. Digitalisasi Administrasi Secara Bertahap dan Terintegrasi

Organisasi perlu menerapkan sistem administrasi digital secara bertahap, dimulai dari fungsi dasar seperti pencatatan surat masuk/keluar dan pencarian arsip. Selanjutnya, sistem dapat diperluas ke integrasi lintas bagian agar tercapai koordinasi yang lebih baik.

2. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kualitas infrastruktur teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu disiapkan perangkat keras, jaringan internet yang stabil, serta sistem keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen.

3. Pengembangan Kapasitas SDM

Pegawai sebagai pengguna utama sistem digital perlu dibekali dengan pelatihan literasi digital, sosialisasi aplikasi, serta pendampingan teknis. Hal ini akan mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memastikan penerimaan teknologi berjalan optimal.

4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan audit trail, backup data otomatis, serta notifikasi digital harus dimaksimalkan untuk memperkuat akuntabilitas dan mengurangi potensi penyalahgunaan dokumen.

5. Keselarasan dengan Regulasi Nasional

Implementasi aplikasi digital harus merujuk pada kebijakan SPBE (Perpres No. 95 Tahun 2018) dan Permenkominfo No. 7 Tahun 2023. Hal ini memastikan sistem yang dikembangkan tidak hanya bermanfaat di tingkat internal organisasi, tetapi juga mendukung integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Perlu dilakukan evaluasi rutin untuk menilai sejauh mana aplikasi digital yang digunakan telah memenuhi kebutuhan organisasi. Monitoring berkala juga membantu mengidentifikasi kendala teknis maupun non-teknis yang muncul di lapangan.

B. Rekomendasi Akademis

1. Pengembangan Penelitian Lanjutan

Penelitian berikutnya dapat memperluas kajian pada aspek efektivitas implementasi digitalisasi administrasi dengan pendekatan kuantitatif, misalnya mengukur efisiensi waktu dan biaya secara terukur.

2. Studi Perbandingan Antarinstansi

Disarankan adanya penelitian perbandingan implementasi digitalisasi administrasi di beberapa instansi pemerintahan untuk menemukan pola keberhasilan maupun hambatan yang bersifat umum.

3. Kajian Kesiapan SDM dan Infrastruktur

Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada analisis kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi sebagai faktor kunci keberhasilan digitalisasi.

4. Integrasi dengan Sistem Layanan Publik

Riset lanjutan dapat meneliti hubungan antara digitalisasi administrasi internal dengan peningkatan kualitas pelayanan publik secara langsung, sehingga terlihat dampaknya terhadap kepuasan masyarakat.

5.3 Implementasi

A. Tahap Persiapan

1. Analisis Kebutuhan

Melakukan identifikasi rinci terhadap kebutuhan administrasi organisasi, termasuk jenis dokumen yang paling sering digunakan, alur distribusi surat, serta pola koordinasi antarbagian.

2. Penganggaran dan Dukungan Kebijakan

Menyusun alokasi anggaran untuk infrastruktur TI, pelatihan pegawai, dan pengadaan aplikasi. Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.

3. Penyusunan SOP Digital

Membuat standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai pencatatan surat digital, penyimpanan arsip elektronik, serta mekanisme backup dan audit trail.

B. Tahap Pengembangan Sistem

1. Pemilihan Platform/Aplikasi

Menggunakan aplikasi yang sesuai dengan regulasi SPBE (misalnya aplikasi SRIKANDI atau e-Office) atau mengembangkan sistem internal yang kompatibel dengan sistem nasional.

2. Desain User-Friendly

Menjamin antarmuka aplikasi mudah digunakan, dengan navigasi sederhana dan fitur pencarian cepat agar dapat diterima oleh semua pegawai.

3. Integrasi Sistem

Menghubungkan sistem administrasi digital dengan layanan internal lain, seperti kepegawaian, keuangan, dan pelayanan publik, sehingga koordinasi lintas bagian lebih efektif.

C. Tahap Implementasi

1. Digitalisasi Arsip Lama

Melakukan pemindaian arsip fisik ke dalam format digital agar tidak hanya dokumen baru yang terkelola, tetapi juga dokumen lama dapat diakses cepat.

2. Penerapan Bertahap

Implementasi dimulai dari unit atau bagian tertentu sebagai pilot project, lalu diperluas ke seluruh organisasi setelah sistem terbukti berjalan baik.

3. Pelatihan dan Pendampingan

Menyelenggarakan pelatihan literasi digital dan simulasi penggunaan aplikasi bagi seluruh pegawai, disertai pendampingan intensif pada tahap awal.

D. Tahap Penguatan dan Evaluasi

1. Monitoring Rutin

Melakukan pengawasan berkala terhadap penggunaan aplikasi, termasuk kecepatan distribusi dokumen, tingkat keamanan, dan kepuasan pengguna.

2. Evaluasi Kinerja

Menilai efektivitas aplikasi dengan indikator efisiensi waktu, penghematan biaya operasional, peningkatan koordinasi, dan kualitas pelayanan publik.

3. Perbaikan Berkelanjutan

Mengadakan forum umpan balik bagi pengguna untuk mengidentifikasi kendala teknis dan menyempurnakan sistem secara berkesinambungan.

E. Tahap Keberlanjutan

1. Integrasi dengan SPBE Nasional

Menyelaraskan aplikasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar dapat terhubung dengan layanan administrasi lintas instansi.

2. Peningkatan Keamanan Data

Mengembangkan sistem backup ganda (cloud dan lokal), serta menerapkan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan dokumen.

3. Pengembangan Layanan Publik Digital

Memperluas implementasi dari administrasi internal ke pelayanan publik berbasis digital, sehingga manfaat digitalisasi langsung dirasakan masyarakat.